

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- .: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - 6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

- Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
- 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
- 11.Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBU-KAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama

: Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal I sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima

: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam

: Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

. H. TARMIZI TAHER /

Tembusan :

1. Menko Kesra:

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;

4. Menteri Dalam Negeri RI;

5. Menteri Keuangan RI;

6. Komisi IX DPR RI;

7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;

8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;

9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;

10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;

11. Para Kepala Kuntor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;

12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia:

13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;

14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;

15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

	16	5	7			Apr. 10 100			-	ACCUS MANAGEMENT			8	
	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara										Parameter	
-	160	159	158	157	156	155	72	25	153	(3)	150	149	CHALIET	MON
	_	-	-	=	10	9	00	7	0.		An and the	w	6	3
	Madrasah Ibudaiyah Negeri Lakudo	Madrasah Ibndaiyah Negeri Ponian	Madrasah Ibndaiyah Negeri II Bailang	Madrasah Ibndaiyah Negeri Kebun Bunga	Madrasah Ibudanyah Negeri Kembang Kuring	Madrasah Ibodaiyah Negeri Gelagah	Madrasah Ibulinyah Negeri Rantau Kemining	Madrasah Ibulaiyah Negeri Ibung	Madrasah Ibodayah Negeri Binjai Pamangidh	Madrasah Ibodaiyah Negeri Simp. Nungiri	Madrasah Ibodaiyah Negeri Bangkal	Madrasah Ibodaiyah Negeri Musra Halayung		HVSPECITE PRES
THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Bau-Bau di Ds. Lakudo Kellakudo Kec. Lakudo Kab. Buton	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Ponian Kec. Sendana	Madrasah Ibudaiyah Negeri Filial Bailang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filail Sumahıt Taufik II. Manggis Kec. Banjar Timur	Madrasah Ibudaiyah Negeri Darul Ulum Il Desa Kembang Kurung Kec. Amuniai Tengah	Madrasah Ibridaiyah Negeri Filial Jadul Ma'at IL Desa Gelagah Kec. Sei Pandan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Rantau Keminting II. Desa Rantau Keminting Kec. Aman Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Asyariah ILH.Datuan Huri Desa Ilung Kec. Batang Alali Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Binjai Pamangkih Ds. Binjai Pamangkih Kec. Labuhan Aman Utara	Madrasah Ibridaiyah Negeri Filial Miftahul Hair II. Simp. Nungki Kec. Cirebon	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Miftahul Aula II. Mistar Cokrokusumo Bangkal Kec. Cempaka	Madrasah Ibidaiyah Negeri Hampas Masa IL Halayung Rt.4 Kel. Muam Kec. Aluh-Aluh		PERUBAHAN DARI
	Kab. Buton	Kab. Majene	Kodya Manado	Kodya Banjannasin	Kab. HS Utara	Kab. HS Utara	Kab. HS. Tengah	Kab. HS. Tengah	Kab. HS. Tengah	Kab. Barito Kuala	Kab. Banjar	Kab. Banjar		KAB/KOONA
										1				KEI.